

RENCANA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT  
DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA\*)

ABDU RACHMAN  
(DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN)

---

\*) Makalah Pengarahan Pada Studi Seminar Implementasi  
Wawasan Nusantara Di Bidang Perikanan, Biotrop-Bogor,  
14-15 Desember 1982.

RENCANA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT  
DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN  
IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA

---

1. PENDAHULUAN

Terlebih dahulu saya ingin menyampaikan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan makalah dalam rangka Studi Seminar Implementasi Wawasan Nusantara di bidang perikanan ini.

Sesuai dengan permintaan Tim Pengarah, maka makalah yang saya sampaikan berjudul "RENCANA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT DI INDONESIA DALAM HUBUNGANNYA DENGAN IMPLEMENTASI WAWASAN NUSANTARA".

Untuk ini maka saya coba menyusun sistematika makalah ini sebagai berikut :

1. Pendahuluan.
2. Perkembangan Perikanan Selama Pelita III.
3. Pola Pembangunan Perikanan.
4. Rencana Pemerintah Dalam Pengembangan Perikanan Laut Dalam Repelita IV.

Sejalan dengan tujuan daripada Seminar maka makalah ini diarahkan untuk membahas aspek perikanan laut dalam rangka pengimplementasian Wawasan Nusantara.

Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) 1978 menetapkan bahwa wawasan dalam mencapai tujuan pembangunan nasional adalah Wawasan Nusantara yang mencakup perwujudan kepulauan Nusantara sebagai :

- Satu Kesatuan Politik;
- Satu Kesatuan Sosial Budaya;
- Satu Kesatuan Ekonomi, dan
- Satu Kesatuan Pertahanan dan Keamanan.

Diantara empat unsur Perwujudan tersebut di atas, perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi adalah yang paling relevan dengan strategi pengembangan perikanan, khususnya perikanan laut yang akan disajikan dalam makalah ini.

Dalam GBHN 1978 perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu Kesatuan Ekonomi diberi arti sebagai berikut :

1. Bahwa kekayaan Wilayah Nusantara baik potensial maupun efektif adalah modal dan milik bersama, dan bahwa keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah Tanah Air.
2. Tingkat perkembangan ekonomi harus serasi dan seimbang di seluruh daerah tanpa meninggalkan ciri-ciri khas yang dimiliki oleh daerah-daerah dalam pengembangan kehidupan ekonominya.

Konsep pengembangan perikanan tidak terlepas dari tujuan pembangunan Nasional seperti tercantum pada GBHN 1978. Sebagai kegiatan yang bergerak dalam bidang penggalian sumberdaya alam, dalam hal ini sumberdaya perikanan, usaha perikanan mempunyai peranan yang cukup penting dalam pencapaian tujuan pembangunan Nasional, khususnya sebagai bidang usaha yang ikut menyumbang dalam penyediaan lapangan kerja yang produktif, penyediaan bahan pangan dan bahan industri dan dalam mengisi perbendaharaan Negara. Kesemuanya itu hanya dapat dicapai secara maksimal bila penggalian sumberdaya perikanan tersebut didasarkan atas azas-azas ekonomi yang optimal dengan mengembangkan nilai tambahan (value added) sejauh dimungkinkan, serta dengan memegang teguh azas-azas yang dapat menjamin kelestarian sumber.

## 2. PERKEMBANGAN PERIKANAN SELAMA PELITA III.

Sampai dewasa ini produksi perikanan laut sebagian

besar masih berasal dari usaha penangkapan. Akan tetapi akhir-akhir ini sudah mulai dirintis usaha pemeliharaan beberapa biota laut seperti ikan, karang-karangan dan rumput laut.

Ditinjau dari daerah penangkapannya kurang lebih 91,47 % produksi perikanan laut berasal dari penangkapan di perairan pantai, sedangkan produksi perikanan yang berasal dari perairan lepas pantai dan laut dalam masih terbatas, yaitu berturut-turut sekitar 7,43 % dan 1,1 % dari produksi perikanan tahun 1980.

Dalam tahun 1981 produksi ikan yang berasal dari usaha penangkapan di laut tercatat sebesar 1,387 juta ton. Dibandingkan dengan potensi sumber perikanan yang tersedia, maka secara nasional jumlah produksi ikan pada tahun 1981 baru mencapai 30 %. Namun secara regional dan ditinjau dari kasus pemanfaatan sumberdaya perikanan di beberapa daerah telah mencapai tingkat eksploitasi penuh. Kurang lebih 57,2 % dari produksi perikanan berasal dari perairan Paparan Sunda dan Selat Malaka, 15,6 % berasal dari Samudra Indonesia dan 27,2 % berasal dari perairan Indonesia Timur. Keadaan ini menunjukkan bahwa usaha pemanfaatan perikanan masih dapat ditingkatkan terutama di perairan lepas pantai dan samudra yang belum diusahakan secara optimal.

Produksi perikanan laut memberikan sumbangan peningkatan produksi rata-rata sebesar 4,2 % setahun. Laju peningkatan produksi perikanan laut yang besarnya 4,2 % per tahun tersebut terutama disebabkan oleh semakin meningkatnya penggunaan perahu/kapal motor serta penggunaan alat tangkap yang lebih produktif oleh para nelayan. Dalam tiga tahun pertama Pelita III jumlah perahu/kapal motor meningkat dari 25.992 buah pada tahun 1978 menjadi 48.600 buah pada tahun 1981, dengan kenaikan rata-rata 23,2 % per tahun. Dengan pesatnya motorisasi tersebut secara keseluruhan produktivitas perahu/kapal perikanan laut rata-rata mengalami kenaikan sebesar 0,7 % per tahun, yakni dari 4,9 ton/kapal/tahun pada tahun

1978 menjadi 5,1 ton/kapal/tahun pada tahun 1981.

Untuk menunjang peningkatan produksi perikanan telah dibangun 24 pelabuhan yang dilengkapi dengan fasilitas seperti dermaga, instalasi air, gudang pendingin, pabrik es, gedung pelelangan dan sebagainya. Begitu pula telah dilaksanakan rehabilitasi tempat-tempat pendaratan ikan yang sampai akhir tahun 1981 telah mencapai 145 buah.

Disamping untuk konsumsi lokal, produksi perikanan juga telah merupakan komoditi ekspor. Dalam tiga tahun pertama Pelita III ekspor hasil perikanan mengalami kenaikan rata-rata 10,3 % per tahun dalam volume dan 6,1 % per tahun dalam nilai, yakni dari 63.485 ton dengan nilai US \$ 193.424.000 pada tahun 1978 menjadi 85.110 ton dengan nilai US \$ 231.090.000 pada tahun 1981.

Walaupun secara keseluruhan dalam kurun waktu 3 tahun pertama Pelita III volume ekspor perikanan mengalami kenaikan yang cukup pesat, tetapi dalam nilai ekspor perikanan mengalami peningkatan yang agak lamban bila dibandingkan dengan tahun 1979, dimana ekspor perikanan mencapai puncaknya. Lambannya peningkatan nilai ekspor tahun 1980 dan tahun 1981 terutama disebabkan oleh turunnya ekspor udang. Dalam tahun 1981 ekspor udang turun -18,9 % dalam volume dan -6,0 % dalam nilai.

Secara kuantitatif hasil perikanan yang diekspor meliputi 4,5 % dari total produksi pada tahun 1981, sedangkan secara kualitatif sebagian besar terdiri dari komoditi yang bernilai tinggi yang relatif tidak banyak dibutuhkan oleh konsumen dalam negeri, terutama yang berpenghasilan rendah. Dari komposisi hasil perikanan yang diekspor pada tahun 1981 sebanyak 44.175 ton atau 52 % dalam volume terdiri dari udang, tuna, cakalang, kaki kodok, ubur-ubur asin dan ikan hias dengan menghasilkan US \$ 197,5 juta atau 85 % dari nilai devisa yang diperoleh.

Sebagaimana lazimnya di negara yang menganut kebebasan

perdagangan luar negeri, di Indonesia terdapat pula impor hasil perikanan, baik yang bersifat mutlak karena kekurangan persediaan di dalam negeri maupun yang tergolong oleh permintaan selektif sebagai akibat tuntutan selera yang semakin tinggi. Dari tiga tahun pertama Pelita III, impor hasil perikanan meningkat dari 27.099 ton dengan nilai US \$ 10.029.000 pada tahun 1978 menjadi 58.989 ton dengan nilai US \$ 37.133.000 pada tahun 1981 dengan kenaikan rata-rata 29,6 % per tahun dalam volume dan 54,7 % per tahun dalam nilai. Naikinya impor hasil perikanan ini terutama karena melonjaknya impor tepung ikan untuk bahan campuran makanan ternak/unggas, sedang impor hasil perikanan yang merupakan bahan makanan manusia hanya merupakan bagian kecil dari total impor tahun 1981, yaitu hanya sekitar 15 % baik dalam volume maupun nilai.

Penanaman modal dalam sub sektor perikanan sejak tahun 1969/1970 hingga tahun 1981/1982 meliputi nilai US \$ 53.473.716 untuk perusahaan PMA dan Rp 10.105.515.460,- untuk perusahaan PMDN. Jumlah perusahaan dalam rangka PMA dan PMDN hingga saat ini tercatat 32 buah dengan perincian 15 buah perusahaan PMA dan 17 buah perusahaan PMDN.

Dilihat dari bidang usahanya, sebagian terbesar perusahaan PMA dan PMDN ini bergerak dalam bidang penangkapan udang (17 buah), kemudian dalam bidang pengumpulan udang dan hasil perikanan lainnya (7 buah), dalam bidang penangkapan cakalang (1 buah), dalam bidang budidaya mutiara (4 buah), dalam bidang ikan hias, coral dan tambak (masing-masing 1 buah).

Terwujudnya penanaman modal dalam sub sektor perikanan antara lain telah meningkatkan pendapatan devisa negara, serta telah dapat menyerap 11.189 orang tenaga kerja Indonesia. Selanjutnya masuknya penanaman modal dalam sub sektor perikanan tersebut ternyata telah menarik sektor swasta nasional untuk ikut menanamkan modalnya dalam kegiatan-kegiatan perikanan, serta mendorong usaha perikanan tradisional untuk memotorisir perahu yang dipergunakan.

Perkembangan perikanan tersebut di atas ternyata tidak selalu berjalan secara seimbang. Adanya peningkatan yang sangat pesat dari usaha perikanan yang menggunakan alat modern khususnya dalam penangkapan udang dengan menggunakan trawl menyebabkan sering terjadi jumlah kapal-kapal trawl yang beroperasi di perairan-perairan melebihi jumlah optimal yang semestinya beroperasi sesuai dengan keadaan potensi sumber. Sebagai akibatnya terjadi penurunan hasil tangkapan per unit usaha serta timbulnya keresahan-keresahan dilangan nelayan tradisional yang disebabkan oleh adanya saingan tidak sehat dengan kapal-kapal trawl.

Untuk mencegah agar keresahan nelayan tradisional tersebut tidak berlarut-larut serta untuk mempertahankan kelestarian sumber hayati perikananannya, telah dikeluarkan SK. Menteri No. 607 dan No. 609 tahun 1976 yang mengatur jalur-jalur dan daerah penangkapan ikan. Disamping itu telah dikeluarkan pula SK. bersama antara Dirjen Perikanan, Dirjan Perhubungan Laut dan Dirjen Industri Logam dan Mesin No. H.II/4/17/77 DPK.46/I/10; 37/DJ-Kpts ILM/1977, tahun 1977 yang mengatur agar setiap penambahan kapal bermotor dalam (in-board) buatan dalam negeri dengan tonage lebih dari 20 GT, sejak gahap konstruksi sudah harus mendapatkan daerah penangkapan.

Dengan Keputusan Presiden No. 39 tahun 1980 telah ditetapkan penghapusan trawl secara bertahap. Sebagai langkah pertama sejak tanggal 1 Oktober 1980 penggunaan jaring trawl dilarang seluruhnya beroperasi di perairan Jawa dan Bali, dan sejalan tanggal 1 Januari 1981 hal yang serupa dilarang di perairan sekitar Sumatera, sedangkan sampai dengan tanggal 1 Juli 1981 jumlah trawl yang diberi ijin beroperasi di luar Jawa, Bali dan Sumatera dikurangi jumlahnya sehingga sisanya 1.000 buah.

Jumlah jaring trawl sampai dengan tahun 1980 adalah 3.300 unit, dengan produksi 183.830 ton yang terdiri dari 145.190 ton ikan dan 36.640 ton udang. Dengan pengurangan trawl sebanyak 2.300 unit, maka akan terjadi penurunan

produksi sebesar 124.718 ton yang terdiri dari 107.974 ton ikan dan 16.744 ton udang. Berkurangnya produksi ikan/udang ini akan diimbangi dengan penambahan produksi yang berasal dari pengembangan intensifikasi/ekstensifikasi budidaya tambak (udang), intensifikasi jaring klitik dan pengoperasian dogol serta alat-alat lainnya.

Penghapusan trawl tahap ke II yang jumlahnya 1.000 buah sebagaimana diatur dalam Inpres No. 11.1982, sudah harus selesai seluruhnya sampai dengan batas waktu tanggal 1 Januari 1983. Kapal-kapal trawl tersebut terdiri dari milik perorangan sebanyak 700 buah, swasta nasional 117 buah, PMDN 77 buah, dan PMA 106 buah. Khusus untuk perairan Arafuru para pengusaha dapat mengalihkan usahanya pada penggunaan pukat udang yang baru dikembangkan.

### 3. POLA PEMBANGUNAN PERIKANAN.

Dalam melaksanakan pembangunan perikanan nasional faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan adalah :  
Pertama, keadaan wilayah Indonesia yang sebagian besar terdiri dari perairan, baik perairan umum berupa sungai, danau, waduk dll., maupun perairan laut yang sangat luas. Sesuai data yang ada, dengan berlakunya Wawasan Nusantara luas wilayah perairan laut Indonesia menjadi 1,7 juta mil persegi, dan diperluas lagi dengan ZEE keseluruhannya menjadi 3,1 juta mil persegi. Di dalam wilayah perairan yang luas tersebut dikandung kekayaan alam hayati flora maupun fauna, yang merupakan sumberdaya hayati perikanan dan menjadi sumber bahan makanan bagi bangsa Indonesia.

Kedua, potensi sumberdaya hayati perikanan tersebut sangat besar, tetapi baru sebagian kecil yang telah dapat dimanfaatkan. Menurut perkiraan, potensi sumberdaya perikanan laut Indonesia mencapai 4,7 juta ton/tahun.

Dari jumlah tersebut baru lebih kurang 30 % yang dapat diusahakan, sedang sisanya mengalami kepunahan secara alami tanpa dapat dimanfaatkan. Kenyataan ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa pengembangan produksi perikanan dimasa mendatang mempunyai landasan yang cukup kuat.

Ketiga, untuk melaksanakan pembangunan nasional pada umumnya dan pengelolaan sumberdaya hayati perikanan pada khususnya, diperlukan modal yang sangat besar baik yang berasal dari dalam negeri sendiri maupun dari luar negeri dalam bentuk devisa. Selama ini sumber devisa negara kita terutama berasal dari ekspor minyak dan gas bumi. Namun dalam tahun-tahun terakhir ini keadaan ekspor minyak kita kurang menggemibirakan, sehingga Pemerintah berusaha keras untuk mendorong peningkatan ekspor komoditi non migas. Salah satu diantaranya adalah ekspor komoditi perikanan yang masih besar kemungkinannya untuk ditingkatkan.

Keempat, ikan dan hasil perikanan lainnya merupakan salah satu sumber protein hewani masyarakat yang sangat vital. Dalam rangka pembangunan bangsa, usaha terhadap perbaikan dan peningkatan mutu gizi makanan rakyat perlu lebih digiatkan. Salah satu jalan yang dapat ditempuh ialah dengan meningkatkan konsumsi protein hewani yang berasal dari ikan. Dari segi ini kita dapat melihat arti penting dan peranan sub sektor perikanan dalam rangka pembangunan bangsa dan negara.

Kelima, peningkatan kesejahteraan dan taraf hidup nelayan dan petani ikan. Kita semua mengetahui bahwa pembangunan nasional yang kita laksanakan dewasa ini adalah dalam rangka pembangunan manusia Indonesia seutuhnya dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini berarti bahwa pembangunan itu haruslah memberikan kesejahteraan jasmaniah dan rohaniah bagi masyarakatnya. Oleh karena nelayan dan petani ikan adalah sebagian dari masyarakat Indonesia yang tergolong tingkat kesejahteraannya masih rendah, maka pembangunan perikanan harus dapat memgerikan pengaruh yang nyata terhadap perbaikan

kesejahteraan nelayan dan petani ikan.

Atas dasar pertimbangan-pertimbangan di atas, pembangunan perikanan diarahkan untuk mencapai peningkatan kesejahteraan taraf hidup nelayan dan petani ikan. Tujuan tersebut merupakan tujuan jangka panjang yang pada hakekatnya adalah mengusahakan agar kegiatan perikanan ini dapat dilaksanakan oleh bangsa Indonesia sendiri, baik itu usaha memproduksi maupun usaha pengolahan dan pemasaran.

Perumusannya nampaknya sangat sederhana, tetapi apabila kita renungkan lebih dalam ternyata implikasinya sangat luas. Namun secara garis besar dapat dirumuskan kedalam 5 sasaran pokok yang harus diusahakan untuk dicapai dalam waktu yang tidak terlalu lama, yaitu :

1. Meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan serta memperluas kesempatan berusaha dan kesempatan kerja produktif dalam sub sektor perikanan.
2. Meningkatkan produksi dan produktivitas usaha nelayan dan petani ikan dengan jalan mengembangkan teknologi yang lebih baik.
3. Meningkatkan konsumsi ikan, terutama di kalangan masyarakat pedesaan dalam rangka perbaikan gizi makanan rakyat dan menunjang pemasaran hasil perikanan, melalui program memasyarakatkan makan ikan.
4. Disamping itu, peningkatan produksi perikanan diarahkan pula untuk meningkatkan peranan sub sektor perikanan sebagai penghasil devisa negara dari komoditi non migas dengan jalan meningkatkan ekspor dan mengurangi impor hasil-hasil perikanan.
5. Meningkatkan pengendalian dan pengawasan kegiatan perikanan sebagai upaya untuk dapat mengurangi sekecil mungkin kegiatan-kegiatan yang merugikan kepentingan sub sektor perikanan pada khususnya dan kepentingan bangsa dan negara pada umumnya.

Kelima sasaran pokok tersebut merupakan suatu kesatuan yang saling menunjang sehingga tidak dapat dipisahkan satu sama lain dalam usaha pencapaiannya. Peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan hanya dapat diwujudkan dengan meningkatkan produksi dan produktivitas mereka. Sedangkan peningkatan produksi akan dapat dicapai dengan jalan meningkatkan produktivitas setiap kegiatan penangkapan ikan maupun budidaya perikanan.

Nelayan dan petani ikan sampai sekarang masih tergolong masyarakat yang pendapatannya secara rasional berada di bawah garis Kebutuhan Fisik Minimal (KFM), yakni rata-rata baru mencapai Rp 35.000,- per kapita per tahun dibandingkan dengan ketentuan KFM nasional yang besarnya Rp 46.000,- per kapita per tahun. Di beberapa daerah seperti Bali, Sumatera Barat, Jawa Barat, Sulawesi dan Maluku pendapatan per kapita nelayan memang telah berada di atas KFM, namun di banyak daerah keadaannya masih memprihatinkan. Kenyataan ini memberikan keyakinan kepada kita bahwa peningkatan pendapatan nelayan dan petani ikan harus ditempatkan pada prioritas utama, karena dengan jalan inilah kita dapat meningkatkan kesejahteraan dan taraf hidup mereka secara bertahap.

Dalam pada itu sasaran meningkatkan konsumsi ikan melalui program memasyarakatkan makan ikan erat kaitannya dengan usaha meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kecerdasan masyarakat, mengingat ikan sebagai salah satu sumber protein hewani yang sangat vital dalam rangka pembinaan bangsa yang sehat, kuat dan cerdas.

Perkembangan produksi perikanan dalam tiga tahun pertama Pelita III telah meningkatkan konsumsi ikan penduduk Indonesia dari 11,4 kg/kapita/tahun pada tahun 1978 menjadi 12,5 kg/kapita/tahun pada tahun 1981. Namun dibandingkan dengan ketentuan yang disepakati secara nasional, yaitu sebesar 22,5 kg/kapita/tahun, tingkat konsumsi ikan yang telah dicapai tersebut baru memenuhi sekitar 55,5 %-nya. Di beberapa

daerah seperti Maluku, Sulawesi dan Kalimantan angka kebutuhan tersebut telah dapat dilampaui. Tetapi di lain-lain daerah seperti Sumatera, Bali, Nusa Tenggara dan seluruh Jawa, konsumsi ikan per kapita masyarakatnya masih dibawah standar kebutuhan tadi, bahkan di Jawa Tengah baru mencapai 5,5 kg/kapita/tahun. Jadi secara nasional kita masih harus meningkatkan usaha kita agar masyarakatnya dapat lebih banyak makan ikan melalui program memasyarakatkan makan ikan, disamping usaha meningkatkan produksi ikan itu sendiri.

Sasaran memasyarakatkan makan ikan dimaksudkan pula untuk mendorong pemasaran hasil perikanan. Oleh karena meningkatnya konsumsi ikan akan berakibat meningkatnya permintaan dan hal ini diharapkan dapat meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan sehingga dapat memberikan dorongan untuk lebih giat berproduksi.

Disamping itu seperti telah disinggung tadi, peningkatan produksi dan produktivitas sub sektor perikanan tidak hanya diarahkan untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan, akan tetapi juga untuk meningkatkan peranan sub sektor perikanan sebagai penghasil devisa dari komoditi non migas.

Walaupun secara keseluruhan ekspor perikanan mengalami kenaikan dalam periode Pelita III, namun sejak tahun 1980 ada tendensi penurunan karena berkurangnya ekspor udang akibat antara lain daripada penghapusan trawl. Keadaan penurunan produksi udang ini diperkirakan untuk sementara masih akan berlangsung karena justru untuk sebagian wilayah Indonesia kebijaksanaan penghapusan trawl baru akan mulai dilaksanakan pada tanggal 1 Januari 1983, walaupun untuk wilayah Indonesia di sebelah Timur 130° BT direncanakan penggunaan pukat udang.

Betapapun besarnya pengaruh kebijaksanaan tersebut terhadap ekspor hasil perikanan, namun harus tetap dilaksanakan oleh karena justru sasarannya secara nasional lebih besar manfaatnya karena menyangkut kelangsungan hidup dari nelayan dan kelestarian sumber perikanan.

Namun disamping itu kitapun perlu prihatin atas keadaan perkembangan ekspor kita itu, mengingat tugas-tugas pembangunan yang kita hadapi dimasa mendatang semakin berat dan memerlukan modal yang semakin besar baik yang bersumber dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Dengan demikian kita harus berusaha karena untuk terus meningkatkan ekspor hasil perikanan ini di dalam Pelita IV mendatang menjadi dua sampai empat kali lipat.

Kesemua kegiatan perikanan yang telah diuraikan tadi akan dapat dilaksanakan secara berkesinambungan apabila selalu didasarkan kepada kemampuan potensi sumber yang mendukungnya. Dalam hal ini apakah usaha pemanfaatan sumber masih dapat lebih ditingkatkan lagi atau perlu dikendalikan, dikaji dengan mempertimbangkan status dari sumber tersebut.

Pengendalian dan pengawasan kegiatan perikanan penting sekali bagi pembangunan perikanan dalam rangka untuk mengusahakan keadaan keseimbangan antara laju perkembangan pemanfaatan dan potensi sumber sehingga dampak negatif dari usaha-usaha pemanfaatan sumber dapat diperkecil.

Namun demikian pengendalian usaha perikanan tidak semata-mata mempertimbangkan aspek biologis dari sumbernya, mengingat bahwa pada dasarnya usaha perikanan merupakan salah satu usaha pemenuhan kebutuhan manusia yang hakiki. Kondisi sosial ekonomi masyarakat serta arti penting usaha perikanan dalam perekonomian daerah maupun nasional ikut pula menjadi bahan pertimbangan.

Dengan pengendalian dan pengawasan kita berharap kegiatan-kegiatan yang merugikan seperti penangkapan ikan dengan bahan peledak dan racun, pengambilan batu karang, kerusakan hutan bakau dan pencurian hasil-hasil perikanan oleh kapal-kapal asing serta pencemaran lingkungan perikanan dapat ditekan seminimal mungkin sehingga kelestarian sumber hayati perikanan dapat dipertahankan.

Dalam kaitannya dengan usaha pengendalian dan pengawasan

kegiatan perikanan, berlakunya Wawasan Nusantara dan deklarasi ZEE oleh Pemerintah R.I. membawa akibat semakin kompleksnya lingkup permasalahan yang harus ditangani. Diperlukan langkah-langkah untuk lebih meningkatkan kemampuan dalam melaksanakan pengendalian dan pengawasan kegiatan perikanan, khususnya berkenaan dengan pengembangan sistem MCS termasuk landasan peraturan yang menunjang pelaksanaan MCS tersebut. Disamping itu agar usaha pengendalian dan pengawasan dapat diselenggarakan dengan baik, maka secara ideal perlu adanya suatu sistem komunikasi yang mampu menjangkau seluruh wilayah perairan, serta satuan fisik berupa pesawat udara dan kapal patroli.

Agar supaya pengendalian dan pengawasan kegiatan perikanan tersebut dapat dilaksanakan lebih efektif, maka sebaiknya Direktorat Jenderal Perikanan sebagai instansi yang mempunyai tanggung jawab dalam sub sektor perikanan memiliki segala sarana yang menunjang tugas-tugas pengendalian dan pengawasan tersebut. Sebagai usaha permulaan untuk lebih memantapkan koordinasi dalam masalah pengendalian dan pengawasan, maka minimal Departemen Pertanian c.q. Direktorat Jenderal Perikanan perlu kiranya dimasukkan sebagai anggota BAKORKAMLA, yang didasarkan kepada SK. Menteri bersama antara MENHANKAM/PANGAB, Menteri Kehakiman, Menteri Keuangan, Menteri Perhubungan dan Jaksa Agung.

Dalam pelaksanaan tugas BAKORKAMLA itu nanti perlu diperhatikan kemungkinan keterlibatan atau pemanfaatan kapal-kapal perikanan milik perusahaan perikanan negara dan bahkan mungkin kapal-kapal nelayan tradisional yang tergabung dalam koperasi, dalam memberikan informasi tentang adanya kapal-kapal asing yang beroperasi di perairan Indonesia. Untuk itu tentunya perlu dirumuskan lebih lanjut mekanisme kerjanya. Disamping itu, data tentang daerah penangkapan, jumlah kapal dan daerah operasinya, pelabuhan pendaratan, spesifikasi kapal yang diberi ijin dsb. senantiasa diinformasikan kepada BAKORKAMLA.

Dalam rangka mencapai sasaran-sasaran pokok pembangunan perikanan, maka usaha-usaha pembangunan perikanan dilaksanakan melalui tiga jalur, yakni :

1. Jalur nelayan dan petani ikan tradisional yang tergabung dalam wadah koperasi/KUD Usaha Perikanan.
2. Jalur perusahaan negara yang secara khusus dibangun dengan misi ganda, yakni disamping tugas-tugas yang bersifat komersial juga mengemban tugas-tugas yang berciri sosial dalam produksi, pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.
3. Jalur swasta, yang berarti usaha pembangunan dan pengembangan perikanan terbuka pula bagi semua pihak baik secara perorangan maupun dalam bentuk badan usaha perikanan yang bersifat swasta.

Ketiga jalur tersebut harus dibina dan dikembangkan secara serasi sehingga dapat terjalin hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dan bukannya hubungan yang penuh persaingan yang saling merugikan. Itulah sebabnya Perusahaan Negara yang mempunyai misi ganda tadi dibebani beberapa fungsi, yaitu :

- a. Sebagai pelopor dalam pengembangan usaha perikanan modern dan usaha-usaha perikanan yang belum menarik sektor swasta.
- b. Sebagai unsur pengembangan (development agent) bagi usaha perikanan rakyat di wilayah kerjanya. Dalam melaksanakan fungsi ini perusahaan-perusahaan negara tersebut bertindak sebagai Perusahaan Inti Rakyat (PIR) melalui pembinaan dan alih teknologi kepada perikanan rakyat serta membantu dalam pengolahan dan pemasaran hasil produksinya.
- c. Sebagai pencetak kader management dan kader teknis dalam usaha perikanan modern.

Perusahaan Negara (6 buah) akan ditingkatkan kemampuannya berproduksi untuk menunjang peningkatan konsumsi ikan di dalam negeri dan peningkatan pendapatan devisa melalui

ekspor. Untuk keperluan tersebut jumlah kapal penangkap ikan akan ditambah dan ukuran kapalnya diperbesar agar dapat menjangkau perairan ZEE dan perairan bebas serta meningkatkan efisiensi usaha.

Didalam rangka membangun dan mengembangkan perikanan melalui tiga jalur tersebut, Pemerintah berkewajiban menyediakan fasilitas utama berupa prasarana dan sarana perikanan, sarana perkreditan serta latihan dan penyuluhan perikanan. Tidak kurang dari 24 pelabuhan perikanan telah dibangun lengkap dengan fasilitas-fasilitas yang diperlukan seperti dermaga, instalasi air, gudang pendingin, pabrik es, gedung pelelangan, dsb. Begitu pula telah dilaksanakan rehabilitasi tempat-tempat pendaratan ikan yang sampai akhir tahun 1981 telah mencapai 145 buah. Untuk masa-masa mendatang pembangunan prasarana dan sarana perikanan tersebut akan terus ditingkatkan hingga mencapai jumlah yang memadai bagi pengembangan perikanan secara nasional.

Berpangkal tolak pada dasar-dasar pertimbangan pembangunan perikanan, tujuan dan sasaran-sasaran yang ingin dicapai, jalur-jalur pendekatan yang ditempuh serta kewajiban pemerintah untuk menyediakan fasilitas utama seperti telah diuraikan tadi, maka saya telah meletakkan empat kebijakan dasar yang harus dipedomani oleh segenap aparatur perikanan, bahkan oleh semua pihak yang secara langsung terlibat dalam proses pembangunan perikanan.

Keempat kebijakan dasar itu adalah :

Pertama, pembinaan nelayan dan petani ikan perlu ditangani secara terpadu oleh semua pihak, terutama oleh tiga komponen yang saya pandang merupakan TRITUNGGAL, yaitu unsur Direktorat Jenderal Perikanan dengan segenap aparatnya sampai tingkat terbawah sebagai jalur Pemerintah, unsur Koperasi sebagai jalur ekonominya dan HNSI dengan satuan-satuan organisasinya sampai unit terkecil sebagai jalur organisasi profesi.

Terhadap daerah-daerah yang potensi sumbernya telah mencapai keadaan kritis, mutlak diperlukan rehabilitasi dan sekaligus dibarengi dengan usaha diversifikasi.

Sedangkan pada daerah-daerah yang masih cukup potensial untuk pengembangan lebih lanjut, disamping melaksanakan intensifikasi juga akan lebih banyak dilakukan perluasan usaha atau ekstensifikasi yang sekaligus dibarengi dengan usaha intensifikasi, modernisasi dan rehabilitasi. Selanjutnya, untuk meningkatkan pendapatan nelayan dan petani ikan sebagai produsen perikanan dan sekaligus dapat meningkatkan kemampuan sub sektor perikanan dalam penciptaan kesempatan kerja yang produktif akan ditingkatkan pola diversifikasi vertikal usaha perikanan.

4. RENCANA PEMERINTAH DALAM PENGEMBANGAN PERIKANAN LAUT DALAM PELITA IV.

Usaha peningkatan produksi perikanan laut dalam Repelita IV selain akan ditempuh melalui pengembangan usaha penangkapan, akan mulai ditempuh pula melalui usaha budidaya. Usaha penangkapan ikan di laut sebagai kegiatan yang bersifat memburu ikan, diarahkan pada rasionalisasi pemanfaatan sumber dengan sasaran mencapai tingkat produktivitas yang optimal dan sekaligus mempertahankan kelestarian sumber. Dengan sasaran semacam itu maka untuk beberapa perairan pantai Utara Jawa, pantai Timur Sumatera di sepanjang Selat Malaka, Selat Bali dan beberapa perairan pantai lainnya sudah harus diadakan pembatasan usaha dengan menyalurkan usaha yang berlebih dan setiap usaha yang baru ke perairan lepas pantai dan perairan pantai daerah lainnya yang masih potensial sumbernya, disamping pula kebidang usaha lain yang memungkinkan termasuk usaha budidaya perikanan. Peningkatan produktivitas usaha penangkapan dilakukan melalui

modernisasi bertahap dan diversifikasi usaha dan diarahkan sekaligus mengisi Wawasan Nusantara dan ZEE di bidang perikanan.

Pengembangan perikanan pantai melalui motorisasi dan modernisasi alat tangkap dilaksanakan di seluruh perairan pantai kecuali daerah-daerah perairan pantai yang padat tangkap dan kritis sumbernya. Bagi daerah-daerah padat, modernisasi usaha disesuaikan dengan potensi sumber yang ada. Jenis alat yang dikembangkan di perairan pantai antara lain adalah gill net, dogol, trammel net, pukot pantai, tonda dan rawai dengan menggunakan perahu motor tempel dan kapal motor kurang dari 10 GT.

Dalam Pelita IV akan dikembangkan sekitar 55.000 unit penangkapan yang dimodernisasi, 10.000 buah perahu motor tempel dan 5.500 buah kapal motor berukuran kurang dari 10 GT.

Pengembangan perikanan lepas pantai diarahkan untuk memperbesar jumlah kapal motor berukuran diatas 10 GT dengan alat tangkap purse seine, pole & line, bottom long line, pancing ikan tuna/cakalang dengan menggunakan payaos atau rumpon dan lain-lain. Perikanan lepas pantai ini terutama sekali dikembangkan di daerah-daerah perairan sebelah Utara, Barat dan Timur Sumatera, termasuk perairan Natuna/Anambas, Selatan dan Utara Jawa, perairan Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Maluku dan Irian Jaya. Dalam Repelita IV akan dikembangkan sekitar 2.100 unit kapal motor berukuran diatas 10 GT sampai 60 GT.

Pengembangan perikanan samudera ditujukan untuk eksploitasi perairan ZEE Indonesia dan samudera bebas, serta lautan dalam di perairan Nusantara seperti Laut Banda dan sebagainya. Jenis kapal yang dikembangkan adalah kapal-kapal penangkap berukuran 60 GT ke atas dengan menggunakan alat tangkap purse seine, gill net, pole & line dan pancing tuna/cakalang dengan menggunakan payaos

dan lain-lain. Jumlah kapal yang akan dikembangkan dalam Repelita, IV sekitar 280 buah.

Penentuan jenis-jenis alat tangkap dan ukuran perahu/kapal penangkap yang akan dikembangkan di masing-masing daerah perairan tersebut diarahkan untuk secara bertahap menuju standarisasi alat dan kapal. Semua rencana Pemerintah dalam pengembangan perikanan seperti yang telah dikemukakan ini sudah barang tentu tidak akan mencapai hasil seperti yang diharapkan apabila tidak ditunjang pula dengan pengembangan pada sektor maupun sub sektor lain diluar perikanan.

Sehubungan dengan sarana perikanan, maka dengan bertambahnya sarana baik kualitas maupun kuantitasnya perlu diimbangi dengan sarana penunjangnya seperti galangan kapal, tersedianya peralatan kapal dan alat penangkapan yang makin maju.

Dari segi teknologi, maka segala rencana pengembangan perikanan yang telah semakin terarah disusun ini perlu diimbangi dengan peningkatan alih teknologi melalui berbagai pendidikan, latihan dan penyuluhan. Salah satu upaya kearah ini ialah penempatan tenaga-tenaga Indonesia pada perusahaan joint venture dan perusahaan negara.

Segala sarana yang akan dibangun dalam rangka pengembangan perikanan tersebut haruslah ditangani oleh tenaga ahli dan terampil dari berbagai bidang yang memang diarahkan untuk menunjang maksud tersebut, utamanya yang bersedia untuk mengabdikan diri dan terjun di lapangan dalam kegiatan pengembangan perikanan di laut. Sumber tenaga kerja ini meliputi BKPI, SUPM, Diklat AUP, dan Fakultas Perikanan/Jurusan Perikanan dari IPB, UNDIP, UGM, UNRI, UNHAS dan lain-lain. Khususnya yang berada dibawah pembinaan Departemen Pertanian maka pembinaan tenaga teknis diarahkan kepada pembinaan tenaga untuk mengisi unit-unit kerja pemerintah, usaha perikanan rakyat, dan perikanan industri. Tenaga-tenaga teknis tingkat menengah yang dihasilkan telah mengisi berbagai bidang kebutuhan

seperti penangkapan ikan, dek, mesin, bagi seluruh perairan Indonesia. sedang pengisian tenaga lapangan (laut) untuk ZEE terutama diharapkan dari Diklat AUP dan tenaga tingkat menengah yang telah ditingkatkan pendidikannya.

Seperti kita ketahui bahwa berhasilnya perjuangan Wawasan Nusantara dan ZEE telah memberikan kesempatan yang luas bagi pengembangan perikanan laut. Perairan yang sangat luas dengan beraneka ragam lingkungan dan kekayaan sumberdaya hayati lautnya perlu segera diteliti secara mendalam dan lebih luas lagi agar supaya kekayaan laut tersebut dapat diketahui secara lengkap, sehingga pengembangan, pengendalian dan pengawasan perikanan dapat diarahkan secara tepat.

Saya kira inilah tantangan-tantangan yang kita hadapi dalam pengembangan perikanan dalam hubungannya dengan implementasi Wawasan Nusantara yang perlu dijawab terutama oleh para generasi muda kita.

Demikianlah sumbangan makalah saya pada Studi Seminar Implementasi Wawasan Nusantara di bidang Perikanan dan semoga dapat menjadi bahan yang berguna bagi Saudara-saudara.

DIREKTUR JENDERAL PERIKANAN,  
ttd.

( ARDU RACHMAN )

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Tabel 1. Produksi perikanan, 1978 - 1981

Sub Sektor	Satuan 1,000 ton				Rata-rata kenaikan per tahun
	1978	1979	1980 <sup>r)</sup>	1981 <sup>x)</sup>	
Jumlah <sup>i)</sup>	1.648	1.748	1.850	1.869	4,3
Perikanan Laut	1.227	1.318	1.395	1.387	4,2
Perikanan Darat	420	430	455	482	4,7

r) Angka diperbaiki                      i) pembulatan  
x) Angka sementara

Tabel 2. Perkembangan perahu/kapal penangkap, 1978-1981

Perincian	Satuan : buah				Rata-rata kenaikan per tahun
	1978	1979	1980 <sup>r)</sup>	1981 <sup>x)</sup>	
Jumlah	248.113	257.905	271.856	274.200	3,4
1. Perahu tanpa motor	222.121	225.804	226.866	225.600	0,5
2. Perahu/kapal motor	25.992	32.101	44.900	49.600	23,2

r) Angka diperbaiki  
x) Angka sementara

Tabel 3. Perkembangan volume ekspor hasil perikanan, 1978-1981

Komoditi	1978	1979	1980 <sup>r)</sup>	1981 <sup>x)</sup>	Rata-rata kenaikan per tahun
Jumlah	63.485	68.264	78.705	85.110	10,3
Udang segar/ awetan	32.620	34.743	31.934	25.906	-7,4
Tuna, cakalang	9.426	9.797	11.139	13.093	11,6
Ikan laut lainnya	4.202	6.712	20.169	15.753	55,3
Katak	2.325	2.657	1.612	2.748	5,7
Ubur-ubur (diasin)	1.800	1.436	1.612	2.063	3,5
Ikan hias	359	399	473	365	0,6
Lainnya	12.693	12.520	11.904	25.182	25,7

Sumber : Biro Pusat Statistik

r) Angka diperbaiki

x) Angka sementara

Tabel 4. Perkembangan nilai ekspor hasil perikanan,  
1978 - 1981

Komoditi	Satuan: Fob US \$ 1.000				
	1978	1979	1980 <sup>r)</sup>	1981 <sup>x)</sup>	% Rata-rata kenaikan per tahun
Jumlah	193.424	236.827	226.354	231.090	6,1
Udang segar/ awetan	161.955	200.483	180.904	370.130	1,7
Tuna cakalang	6.193	8.003	12.900	14.446	32,6
Ikan laut lainnya	1.574	2.227	6.473	5.376	50,6
Katak	6.236	7.184	4.754	9.547	15,3
Ikan hias	96	114	136	117	6,8
Ubur-ubur (diasin)	3.982	2.651	2.008	3.302	-6,1
Lainnya	13.388	16.165	19.179	28.164	28,1

Sumber : Biro Pusat Statistik

r) Angka diperbaiki

x) Angka sementara

Tabel 5. Nilai ekspor perikanan menurut negara tujuan,  
1976 dan 1980

Negara tujuan	Satuan US \$ 1.000				
	1976		1980 <sup>r)</sup>		% Rata-rata kenaikan per tahun
	Nilai	(%)	Nilai	(%)	
Jumlah	103.380	100	226.354	100	14,6
Jepang	103.160	78,5	170.486	15,3	13,4
Singapore	6.235	4,7	19.935	8,8	33,6
Hongkong	5.329	4,1	12.412	5,5	23,5
U.S.A.	8.329	6,6	8.796	3,9	0,5
Belanda	5.112	3,9	6.103	2,7	4,5
Lainnya	2.915	2,2	8.722	3,8	31,5

Sumber : Biro Pusat Statistik

r) Angka diperbaiki

Tabel 6. Volume impor hasil-hasil perikanan, 1978 - 1981

Komoditi	1978	1979	1980 <sup>r)</sup>	1981 <sup>x)</sup>	% Rata-rata kena- ikan per tahun
Jumlah	27.099	31.018	39.517	58.989	29,6
Ikan asin/kering/ asap	36	16	92	20	-17,8
Ikan dalam kaleng	7.528	2.202	1.763	1.080	-47,7
Minyak ikan	303	237	155	248	- 6,0
Agar-agar	96	62	159	41	-24,7
Tepung ikan	18.948	27.957	34.194	50.341	38,5
Lainnya	188	544	3.154	7.259	238,0

Sumber : Biro Pusat Statistik

r) Angka diperbaiki

x) Angka sementara

Tabel 7. Nilai impor hasil-hasil perikanan, 1978 - 1981

Satuan : Cif US \$ 1.000

Komoditi	1978	1979	1980	1981	% Rata-rata kena- ikan per tahun
Jumlah	10.029	6.716	20.971	37.133	54,7
Ikan asin/kering/ asap	23	58	31	54	32,9
Ikan dalam kaleng	6.662	2.105	2.438	3.429	-19,9
Minyak ikan	240	264	255	273	4,4
Agar-agar	557	393	848	273	-21,2
Tepung ikan	2.247	3.338	15.997	31.654	141,5
Lainnya	212	294	1.208	1.450	69,1

Sumber : Biro Pusat Statistik

r) Angka diperbaiki

x) Angka sementara

Tabel 8. Proyeksi kebutuhan sarana penangkapan ikan (perikanan laut) dalam REPELITA IV

Perincian	1984	1985	1986	1987	1988	Jumlah
a. <u>Perikanan pantai</u>						
- Perbaikan teknik penangkapan	9.540	10.760	11.250	11.520	11.930	55.000
- Motorisasi perahu tanpa motor	1.600	1.800	2.000	2.200	2.400	10.000
- Penambahan kapal motor 10 GT	940	1.060	1.130	1.160	1.210	5.500
b. <u>Perikanan lepas pantai</u>						
- Kapal 10-60 GT	253	387	421	453	486	2.100
c. <u>Perikanan samudra</u>						
- Kapal motor 60 GT	44	51	57	61	67	280

Tabel 9. Proyeksi kebutuhan tenaga teknis perikanan menurut tingkat pendidikan per tahun dalam Repelita IV

Tingkat pendidikan	Jumlah	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
SD	1.182	223	229	234	245	251
SLP	1.834	355	365	376	388	400
SLA	3.636	705	715	726	738	752
S.M.	1.754	320	340	350	360	374
Sarjana	1.366	263	268	273	278	284
Jumlah :	9.822	1.876	1.917	1.959	2.009	2.061

Tabel 10. Proyeksi kebutuhan tenaga penyuluh perikanan lapangan dalam Repelita IV

Bidang keahlian	Jumlah	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
1. Penangkapan						
- di laut	3.000	512	574	610	635	660
- perairan umum	455	85	87	90	95	98
2. Budidaya						
- air payau	720	130	130	141	153	166
- air tawar	4.586	698	777	876	1.037	1.198
- laut	320	30	37	52	76	125
3. Pembenihan udang	1.317	261	219	231	276	330
4. Pengolahan	352	60	66	71	75	80
Jumlah :	10.750	1.776	1.890	2.071	2.347	2.666

Tabel 11. Proyeksi kebutuhan tenaga teknis perikanan menurut unit kerja per tahun dalam Repelita IV

Unit kerja	Jumlah	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
1. <u>Pusat</u>	<u>2.152</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>430</u>	<u>432</u>
1.1 Ditjen Perikanan	300	60	60	60	60	60
1.2 UPT/Calon UPT Ditjen	1.852	370	370	370	370	372
2. <u>Daerah</u>	<u>6.620</u>	<u>1.290</u>	<u>1.311</u>	<u>1.323</u>	<u>1.338</u>	<u>1.358</u>
2.1 Dinas Perikanan Propinsi	990	194	196	198	200	202
2.2 Dinas Perikanan Tingkat II	2.060	404	409	413	417	417
3. <u>Perusahaan Perikanan</u>	<u>1.050</u>	<u>156</u>	<u>76</u>	<u>206</u>	<u>241</u>	<u>271</u>
3.1 Badan Usaha milik Negara	1.050	156	76	206	241	271
Jumlah :	9.822	1.876	1.917	1.959	2.009	2.061

Tabel 12. Proyeksi kebutuhan tenaga kerja teknis perikanan menurut tingkat pendidikan dalam Repelita IV

Unit kerja	Jumlah	SD	SLP	SLA	SM	Sarjana
1. Pusat	<u>2.152</u>	<u>252</u>	<u>444</u>	<u>946</u>	<u>394</u>	<u>116</u>
1.1 Ditjen Perikanan	300	10	30	120	100	45
1.2 UPT/Calon UPT Ditjen	1.852	222	414	826	294	71
2. Daerah	<u>6.620</u>	<u>930</u>	<u>1.178</u>	<u>2.248</u>	<u>1.177</u>	<u>1.087</u>
2.1 Dinas Perikanan Propinsi	990	-	-	310	180	500
2.2 Dinas Perikanan Tingkat II	2.060	-	-	1.150	570	340
2.3 UPT Dinas/ Propinsi	3.570	930	1.178	788	427	247
3. Perusahaan Perikanan	<u>1.050</u>	-	<u>262</u>	<u>442</u>	<u>183</u>	<u>163</u>
3.1 Badan Usaha milik	1.050	-	262	442	183	163
Jumlah :	9.822	1.182	1.884	3.636	1.754	1.366

Tabel 13. Perkiraan penyerapan tenaga dalam sub sektor perikanan dalam Repelita IV

PERINCIAN	Jumlah	84/85	85/86	86/87	87/88	88/89
1. Perikanan laut	75.000	12.500	13.500	14.500	16.500	18.000
2. Perikanan darat	101.500	18.000	18.700	20.000	22.200	22.600
3. Pengolahan/indus- trialisasi dan pemasaran	141.500	17.000	28.700	30.300	32.000	33.500
Jumlah :	318.000	31.300	60.900	64.800	70.700	74.100